PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK PADA PEKERJAAN SEKTOR INFORMAL DI KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG

Clarista Olivia Alberta

Program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
clarista.19073@mhs.unesa.ac.id

Eny Sulistyowati

Program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
enysulistyowati@unesa.ac.id

Abstrak

Pekerja anak pada dasarnya dilarang untuk bekerja, namun dalam kondisi tertentu yang mereka alami anak diizinkan untuk bekerja. Bagi anak yang terdesak karena keadaan ekonomi yang dialami oleh keluarganya mau tidak mau mereka dituntut untuk mengikuti kegiatan mencari nafkah. Tentu hal ini dapat merengkut masa kecil anak yang seharusnya bisa mereka dapatkan, seperti dapat bermain-main layaknya anak kecil pada umumnya, berada dalam suasana yang aman, nyaman, dan tenang, serta tidak seharusnya merasakan tekanan dalam memikirkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Tingginya kemiskinan inilah yang menjadi penyebab terkuat munculnya pekerja anak di sektor informal maupun formal. Keberadaan pekerja anak juga akan terus menyebabkan terpeliharanya kemiskinan, karena banyak dari mereka yang terlibat dalam pekerjaan tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan karena kendala biaya. Dikeluarkannya Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu upaya negara dalam memberikan perlindungan bagi setiap orang yang terikat dalam perjanjian kerja. Tidak hanya orang dewasa saja yang dilindungi oleh peraturan tersebut, namun didalamnya memuat juga syarat-syarat memperkerjakan anak meskipun pada dasarnya anak dilarang untuk bekerja. Hal tersebut masih dapat ditolerir apabila pengusaha atau pemberi kerja memenuhi syarat-syarat memperkerjakan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Penulisan ini termasuk dalam penulisan hukum empiris yaitu metode pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, menghasilkan data deskriptif yang dituangkan melalui lisan ataupun tertulis dari fenomena atas perilaku tertentu. Lokasi penelitian berada di Malang, Alun-Alun Merdeka Kecamatan Klojen. Hasil dari penelitian ini masih banyak pelaku usaha yang tidak memahami syarat memperkerjakan anak, serta pihak pemerintah yang berkaitan kurang maksimal dalam melakukan upaya hukum terhadap pekerja anak khususnya sektor informal.

Kata Kunci : Pelaku Usaha, Pekerja Anak Sektor Informal, Ketenagakerjaan.

Abstract

Child laborers are basically prohibited from working, but under certain conditions they experience children are permitted to work. For children who are under pressure due to the economic conditions experienced by their families, they are inevitably required to take part in activities to earn a living. Of course, this can rob children of the childhood they should be able to get, such as being able to play around like small children in general, being in a safe, comfortable and peaceful atmosphere, and not having to feel pressure when thinking about meeting their family's living needs. This high level of poverty is the strongest cause of the emergence of child labor in the informal and formal sectors. The existence of child labor will also continue to lead to the maintenance of poverty, because many of those involved in work do not have the opportunity to continue their education due to financial constraints. The issuance of Law No. 13 of 2003 concerning Employment is one of the state's efforts to provide protection for everyone who is bound by a work agreement. Not only adults are protected by this regulation, but it also contains conditions for employing children even though children are basically prohibited from working. This can still be tolerated if the entrepreneur or employer fulfills the requirements for employing children in accordance with the relevant laws and regulations. This writing is included in empirical legal writing, namely the approach method used is qualitative, producing descriptive data expressed verbally or in writing from phenomena regarding certain behavior. The research location is in Malang, Alun-Alun Merdeka, Klojen District. The results of this research are that there are still many business actors who do not understand the conditions for employing

children, and the relevant government authorities are not optimal in taking legal action against child labor, especially in the informal sector.

Keywords: Business Actors, Informal Sector Employees, Employment.

PENDAHULUAN

Anak adalah sumber investasi dan harapan bagi negara sebagai pewaris generasi mendatang. Penting untuk diingat bahwa anak adalah ciptaan Tuhan yang memiliki hak asasi yang sama seperti manusia lainnya. Oleh karena itu, tidak ada individu atau kelompok lain yang diperbolehkan untuk merampas hak-hak tersebut, serta negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak anak (Muhtaj, 2013). Oleh sebab itu, pentingnya untuk selalu melindungi anak dan memperhatikan perkembangannya, tidak hanya orang tua saja namun negara harus ikut andil dalam memperhatikan perkembangan dan bentuk perlindungan hak-hak mereka. Hal ini selaras dengan tujuan perlindungan anak yang dimuat dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Berdasarkan pasal di atas, anak-anak juga termasuk dalam kelompok yang rentan membutuhkan perlindungan terhadap hak-hak mereka dalam segala aspek, termasuk anak-anak yang bekerja. Mereka berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang tanpa adanya diskriminasi, kekerasan, atau eksploitasi. Waktu mereka selayaknya digunakan untuk mendapatkan pendidikan, bermain, merasa senang, dan diberikan fasilitas yang memungkinkan mereka mencapai potensi sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis, intelektual, dan sosial mereka. Dengan cara ini, akan tercipta generasi anak-anak yang berkualitas, serta untuk terlaksananya pembinaan dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak tentu dibutuhkan dukungan dari kelembagaan yang kuat serta perangkat hukum yang memadai (Hadiwijoyo, 2015).

Isu pekerja anak (*child labor*) ini telah menggelobal dan harus mendapatkan perhatian khusus, karena begitu banyak anak-anak diseluruh dunia yang terlibat dalam kegiatan ekonomi atau menjadi pekerja pada usia dini. Membahas pekerja anak bukanlah point dari anak-anak yang bekerja lalu mendapatkan upah, tetapi rekat sekali dengan jenis pekerjaan yang berbahaya. Selain itu, hal ini juga berdampak pada

terhambatnya akses pendidikan anak-anak dan perkembangan fisik, psikologis, dan sosial mereka (Muhammad Joni, 1999). Sejumlah anak di bawah usia 18 tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi dan menjadi pekerja anak, terutama dalam sektor informal, karena orang tua mereka mengalami keterbatasan ekonomi yang rendah. Lebih ironisnya lagi bagi mereka yang telah putus sekolah karena ketidakmampuan orang tua mereka dalam menanggung biaya pendidikan khususnya anak-anak dalam ekonomi rendah.

Anak-anak yang memutuskan untuk tidak bersekolah tersebut sudah banyak terjadi di negara ini, khususnya pada Kota Malang. Kota Malang dijuluki sebagai Kota Pendidikan karena merupakan salah satu pusat pendidikan di Jawa Timur. Dikutip dari artikel berita JawaPos.com Radar Malang dengan judul Pelajar Kota Malang Putus Sekolah, 9 Juni 2021. Dalam dua tahun terakhir mengalami pelonjakan yang cukup tinggi. Hal tersebut berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang 2020. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Malang menjelaskan bahwa berdasarkan data Dapodik 2022 juga mengalami pelonjakan yang cukup tinggi pada angka putusnya anak sekolah. Berikut dapat diuraikan dalam tabel ini :

Tabel 1. 1 Jumlah Data Anak Putus Sekolah, Kota Malang

Tahun	Tingkat Pendidikan	
	SD	SMP
2019	24	70
2020	5	29
2022	673	1.406
Total	702	1.505

Sumber : Data Pokok Pendidikan & Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2019-2022

Jumlah tersebut bisa lebih banyak dari data yang ada karena tidak semua masyarakat melaporkannya. Ketidakmampuan orang tua dalam membiayai pendidikan anak mengakibatkan mereka mau tidak mau putus sekolah dan harus ikut serta membantu dalam perekonomian orang tua mereka dengan bekerja di sektor formal maupun informal. Tentu hal ini akan membuat mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang bermanfaat bagi masa depan mereka dan dapat merubah pemikiran anak-anak bahwa mencari uang lebih penting daripada bersekolah. Padahal seharusnya anak-anak bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan wawasan ilmu pengetahuan mulai umur 4 tahun hingga 16 tahun dan dapat tumbuh dewasa secara optimal.

Tingginya kemiskinan yang menjadi faktor terkuat munculnya pekerja anak pada pekerjaan sektor informal, selain alasan bekerja untuk membantu orang tuanya. Keterlibatan pekerja anak di sektor informal dalam kegiatan ekonomi dianggap sebagai alasan mekanisme survival untuk mengeliminasi tekanan kemiskinan yang dihadapi orang tua mereka yang tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga dalam mencari penghasilan. Banyak dari anak-anak yang berisiko terperangkap dalam bentuk-bentuk pekerja anak terburuk seperti halnya bekerja pada jam kerja yang dilakukan di malam hari. Padahal pada prinsipnya bahwa anak sepatutnya berada disekolah, bukan bekerja apalagi pada jam malam. Dengan kata lain pekerja anak yang melakukan kegiatan ekonomi karena terpaksa keuangan, maka mereka wajib bekerja pada siang hari dengan maksimal 3 jam kerja, sehingga tidak mengganggu fisik, psikis, dan sosial mereka.

Oleh karena itu, untuk melindungi pekerja anak secara hukum perlu ada pembatasan terhadap jenis pekerjaan atau bentuk pekerjaan tertentu, terutama dalam sektor informal guna untuk memperhatikan

persyaratan yang harus dipenuhi demi keberlangsungan pekerja anak. Hal tersebut, juga dapat dilihat didalam Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, dan juga Surat Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak, yang pada prinsipnya melarang anak untuk bekerja pada jenis-jenis pekerjaan tertentu.

Pekerja anak terdapat di berbagai negara, salah satunya Negara Indonesia, Kota Malang. Kota Malang terletak sebelah selatan dari Kota Surabaya dengan jarak 90 km, dan termasuk kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Letak Kota Malang berada pada dataran tinggi, selain itu kota ini merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Kota Malang juga dikenal sebagai kota industri, pendidikan, dan pariwisata, yang tentunya dapat dikatakan bahwa jumlah penduduknya cukup padat. Dengan populasi yang padat dan banyaknya jumlah pendatang yang mencari nafkah di kota ini, masyarakat dihadapkan padapersaingan dan tantangan untuk bertahan hidup dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan kehidupan yang lebih baik dengan kebutuhan ekonomi semakin meningkat dengan cepat. Akibat dari fenomena tersebut, masyarakat akhirnya diharuskan bekerja karena pekerjaan menjadi sumber pendapatan bagi mereka.

Pekerja Anak di Kota Malang masih banyak sekali ditemukan, sebagaimana dengan banyaknya pekerja anak di Kota Malang dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Usia Kerja yang Bekerja, Kota Malang

Usia	L			P		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
15-19	8.154	5.518	7.039	6.321	5.501	7.119

Sumber : BPS Kota Malang, Jawa Timur

Demi kepentingan yang terbaik bagi pekerja anak pada sektor informal, terutama di Kota Malang harus digalakkan lebih lagi terkait dengan upaya perlindungan pekerja anak sektor informal. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan perlindungan yang optimal bagi mereka. Selain itu dengan adanya fokus pada upaya untuk memperkenalkan langkah-langkah perlindungan pekerja anak akan memungkinkan bagi mereka dapat tumbuh dan berkembang secara normal (Dwiyanti, 2005). Selain itu diharapkan dengan adanya peraturan-

peraturan yang ada di negara ini dapat benar-benar mewujudkan bentuk perlindungan anak yang baik, sehingga pekerja anak boleh cepet terselesaikan permasalahannya. Hal diatas tentu dibutuhkan dukungan yang tidak terlepas dari peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang wajib menegaskan lebih lagi terhadap peraturan pekerja anak, sehingga mereka yang bekerja dapat selalu terpantau hak-hak nya dalam bekerja. Berdasarkan hal diatas penulis akan melakukan pendalaman mengenai perlindungan hukum bagi pekerja anak pada pekerjaan sektor informal dijalanan. Maka dari itu, penulis mengambil judul “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Pekerjaan Sektor Informal DiKecamatan Klojen Kota Malang.”

METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris sosiologis, dengan adanya data lapangan sebagai sumber utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Jenis penelitian ini memiliki tujuan menganalisis hukum yang diambil dari perilaku masyarakat yang berpola dalam keidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Dimana didalamnya terkait dengan upaya perlindungan hukum bagi pekerja anak pada pekerjaan sektor informal.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang telah digunakan ialah pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara untuk menghasilkan data deskriptif yang dituangkan melalui lisan ataupun tertulis dari fenomena atas perilaku tertentu. Dalam pendekatan ini lebih ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini penyusun diharuskan dapat menentukan, data dan bahan bukom mana yang memiliki kualitas dan yang tidak relevan dengan materi penelitian. Selain itu, secara kualitatif pendekatan ini lebih menjuru pada pemahaman masalah dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan realita hidupnya.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih yaitu Alun-Alun Merdeka Klojen, Kota Malang. Alasan penulis memilih Kota Malang sebagai lokasi penelitian karena termasuk kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Kota Malang juga dikenal sebagai kota industri, pendidikan, dan pariwisata, yang tentunya dapat dikatakan bahwa jumlah penduduknya cukup padat. Padatnya jumlah penduduk dan banyaknya pendatang yang mencari

rejek di kota ini menyebabkan masyarakat dituntut untuk bersaing dan bertahan hidup dengan kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi dan meningkat pesat dan tidak menutup kemungkinan untuk para keluarga dengan ekonomi rendah yang melibatkan anaknya untuk mencari nafkah juga.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer yang dimaksud disini yaitu mencakup informasi yang dilakukan secara langsung pada subjek hukum melalui wawancara dan observasi. Wawancara yang akan dilakukan dengan Disnakertrans Prov. Jawa Timur. Selanjutnya, Observasi dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung kegiatan pekerja anak di Alun-Alun Merdeka Klojen, Kota Malang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Data sekunder dalam lingkup hukum seperti hukum primer, sekunder, tersier. Selain itu, Data Sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian pustaka. Data yang berasal dari bahan kepustakaan atau hasil penelitian dikenal sebagai data sekunder. Data primer, sekunder adalah data sekunder dalam ruang lingkup hukum.

5. Informan

Informan merupakan orang yang akan memberikan informasi dan data yang relevan dengan penelitian yang akan diambil. Penelitian ini dilakukan di alun-alun Kota Malang. Informan yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah pekerja anak, pemberi kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pada tahap ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada informan yang nantinya akan digunakan sebagai data primer. Sebelum pertanyaan diajukan, penulis wajib menyiapkan daftar pertanyaan terkait dengan “perlindungan hukum bagi pekerja anak pada pekerjaan sektor informal di Klojen Kota Malang”.

b. Observasi

Pada tahap berikut ini dilakukan dengan cara penulis datang mengunjungi tempat yang akan dilakukan penelitian dengan mengamati kegiatan orang, namun tidak ikut terlibat dalam kegiatannya. Berikut ini penulis akan datang ke tempat-tempat yang biasa ramai pekerja anak

seperti alun-alun Merdeka Klojen, Kota Malang yang sudah diseleksi dan tidak terlibat dalam kegiatannya.

c. Dokumentasi

Pada tahap berikut ini dilakukan untuk mengolah data, seperti gambar dan catatan, teknik dokumentasi ini penting karena akan menganalisis data penelitian serta mengecek kembali data yang didapat akurat sehingga akan mudah dianalisis, dengan mengumpulkan dokumen yang relevan seperti rekaman wawancara dan data pokok dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, serta dokumen-dokumen penunjang lainnya.

7. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data ini dilakukan dengan cara menganalisis secara kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif analitis, khususnya berupa data tertulis atau lisan dan perilaku aktual yang disebut dengan analisis kualitatif. Data ini bertujuan untuk mengetahui situasi terhadap kejadian yang sebenarnya, terhadap keberlakuan hukum.

HASIL dan PEMBAHASAN

1. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Kecamatan Klojen Kota Malang

a. Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Anak

Pada dasarnya persamaan kedudukan tanpa mengenal diskriminasi ialah prinsip hak asasi manusia, tetapi bukan berarti manusia memiliki kebebasan yang sebebaskan-bebasnya tanpa adanya sebuah batasan-batasan, sehingga sebebaskan apapun seseorang untuk menuntut pemenuhan dan penggunaan hak asasinya, harus tetap memperhatikan hak-hak orang lain juga. Sama halnya dengan upaya untuk mewujudkan pemenuhan serta perlindungan hukum hak seseorang untuk bisa mendapatkan pekerjaan dan bekerja. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang adalah prinsip dasar, bahwasannya siapapun warga negara di negeri ini berhak untuk bekerja dan mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak, serta agar tetap terlindungi segala hak mereka dari perlakuan yang adil, layak dalam hubungan kerja.

Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap anak. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

merupakan salah satu aspek perlindungan hukum terhadap pekerja anak terkait dengan pengupahan, dan kesejahteraan pekerja. Khususnya dalam ketentuan pasal 68 sampai pasal 75 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Dalam filosofi larangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan berkaitan dengan upaya melindungi hak asasi seorang anak, yang termuat juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Ida Sri Wahyuni S.H mengungkapkan bahwa pengimplementasian yang dilakukan oleh Disnakertrans Prov. Jatim masih belum menyeluruh, sebagian besar sudah terlaksana dan sebagian kecil masih belum terlaksana khususnya pada data pekerja anak sektor informal. Pasalnya pihak pemerintah sulit untuk mengumpulkan mereka karena tidak menentunya keberadaan pekerja yang selalu berubah-ubah sehingga sulit untuk dikumpulkan *real* nya. Berbeda hal dengan pekerja anak sektor formal. Oleh sebab itu sulit untuk dijangkau perkembangan terhadap anak-anak yang bekerja pada sektor informal.

b. Penerapan Perlindungan Hukum terhadap hak-hak pekerja anak sektor informal oleh Pelaku Usaha.

Maraknya pekerja anak yang terjadi di negeri ini merupakan hal yang perlu selalu di perhatikan dengan sungguh-sungguh. Indonesia berkomitmen akan menjadi negara hukum yang mewujudkan kesejahteraan dan keadilan untuk rakyatnya. Melihat negara Indonesia merupakan negara hukum sudah seharusnya menjamin pemenuhan kewajiban dan hak rakyat secara seadil-adilnya, hal tersebut termasuk dalam kategori hak asasi khususnya dalam bidang ketenagakerjaan terkait hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan.

Pekerja anak tidak terlepas dengan adanya tuntutan keras dari pemberi kerja. Pekerja anak cenderung harus lebih cepat, tanggap, dan harus mau diatur. Hasil wawancara peneliti dengan informan 8, Ibu Ida Sri Wahyuni, S.H mengungkapkan bahwa pekerja

anak lebih sering diatur khususnya pada jam kerja mereka. Kebanyakan dari pekerja anak asongan harus bisa menghabiskan dagangannya sampai habis baru bisa pulang dan mendapatkan perhitungan upah. Pemberi kerja tidak mau tau apakah hal tersebut sudah melanggar syarat-syarat mengenai waktu kerja yang seharusnya dilakukan pekerja anak-anak atau tidak karena kebanyakan dari pemberi kerja atau pelaku usaha tidak memahami adanya syarat-syarat memperkerjakan anak. Hal tersebut dengan jelas melanggar peraturan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Disisi lain, pemberi kerja merasa bahwa hal yang mereka lakukan juga sangat membantu pekerja anak yang membutuhkan uang dan rasa kasian yang dirasakan pemberi kerja yang pada akhirnya memberikan pekerjaan tersebut ke mereka, namun sering kali mereka mengabaikan hak-hak yang seharusnya pekerja anak dapatkan.

Dalam hal ini, seharusnya pemerintah datang untuk meminimalisir hal-hal yang sangat merugikan pekerja anak. Hasil wawancara peneliti dengan informan 8, Ibu Ida Sri Wahyuni, S.H mengatakan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur pada pekerja anak sektor informal hanya mengingatkan berupa pembatasan jam kerja, keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dilakukan secara bergilir. Disnakertrans Prov. Jatim Sub Bagian Pengawas Tenagakerja anak juga memberikan dukungan berupa arahan kepada orang tua mereka serta pembinaan terhadap pembelajaran apabila anak-anak ingin bekerja akan diberikan pelatihan.

c. Upaya Pemantauan Terkait Data Pekerja Anak Sektor Informal Melalui Sistem *Child Labour Monitoring* (CLM) Oleh Disnakertrans Prov. Jatim

Pemantauan Pekerja Anak sangat diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak dalam keadaan yang baik. Salah satu cara yang paling manjur dalam mengatasi permasalahan pekerja anak yaitu pelaksanaan pemeriksaan tempat-tempat dimana anak-anak sedang bekerja berjalan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Disnakertrans Prov. Jatim adalah menggunakan sistem yang disebut dengan *Child Labour Monitoring* (CLM),

sistem tersebut merupakan proses yang memastikan terlaksananya dan terkoordinasinya pemantauan yang dinilai sangat tepat. Tujuan utama dari pemantauan ini agar dapat memastikan bahwa sebagai konsekuensi dari pemantauan tersebut anak-anak dan pekerja muda yang diperkerjakan secara sah serta dapat berada dalam keadaan yang aman dari eksploitasi dan bahaya di tempat kerja.

Kegiatan utama CLM ialah melakukan pengamatan secara langsung yang dilakukan berulang kali secara teratur untuk mendeteksi atau mencari tahu keberadaan pekerja anak baik secara informal maupun formal serta menilai apakah pekerja anak berada dalam resiko-resiko yang berbahaya atau tidak, kemudian dilakukan pengecekan untuk membuktikan apakah mereka pekerja anak dibebaskan dari tekanan yang berat terhadap pemberi kerja, selanjutnya untuk memastikan apakah pekerja anak berada dalam situasi yang benar-benar membaik.

Dalam hal ini, Disnakertrans Prov. Jatim dalam melakukan pemantauan terhadap pekerja anak sektor informal masih belum terlaksana, bahkan data yang seharusnya adapun tidak dimiliki oleh pihak Disnakertrans Prov. Jatim. Padahal seharusnya sebagai Sub Pengawasan yang memantau pekerja anak harus terus dilakukan, tidak hanya pada pekerja anak sektor formal namun informal seharusnya juga dalam pengawasan dan pencatatan data.

Dari hasil wawancara dengan Bu Ida Sri Wahyuni mengungkapkan bahwa pihak Disnakertrans Prov. Jatim kesulitan untuk mencatat data pekerja anak sektor informal karena mereka masih sering kabur-kaburan dan ketidakpastian keberadaan anak-anak yang selalu berubah-ubah tempat. Ibu Ida Sri Wahyuni juga mengungkapkan bahwa pekerja anak sektor formal lebih diutamakan karena adanya hubungan kerja antara anak dan pemberi kerja, namun untuk pekerja sektor informal dianggap tidak ada kejelasan mengenai hubungan kerja antara kedua belah pihak, karena bisa saja pekerja anak tersebut dipekerjakan oleh orang tuanya sendiri atau dagangannya dari orang tua mereka. Disnakertrans Prov. Jatim juga menganggap bahwa hal tersebut sudah selaras dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan, yang didalamnya memuat

syarat-syarat bagi pengusaha atau pemberi kerja untuk memperkerjakan anak. Terdapat syarat utama yaitu adanya izin tertulis dari orang tua/ wali, ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orangtua/wali. Hasil dari pernyataan tersebut yang pada akhirnya menjadi satu kunci untuk Disnakertrans Prov. Jatim lebih memenuhi perlindungan hukum terkait hak-haknya terhadap pekerja anak sektor formal.

Sistem *Child Labour Monitoring* (CLM) dalam pemantauan dan verifikasi telah dianggap berhasil dan efektif dalam membesarkan anak-anak dari belenggu pekerja anak, serta dalam memberikan bantuan terhadap pekerja anak. Pasalnya pertama kali sistem CLM dikembangkan ini berawal dari proyek kerja industri garmen BGMEA di Bangladesh tahun 1995 dan proyek industri pembuatan bola sepakbola Sialkot di Pakistan tahun 1997 (Association, 2004). Pada saat itu proyek-proyek tersebut sering kali bergantung pada pemantauan-pemantauan independen dari luar yang akan dibayar untuk melakukan pemantauan. Berbagai proses pemantauan pekerja anak berbasis pemerintah daerah telah diuji sebagai bagian dari kerangka perlindungan anak dan kerangka dalam ketenagakerjaan yang lebih besar. Berikut adalah contoh pendekatan pemantuan anak yang mungkin dapat dilakukan kedepan oleh pihak pemerintah di Indonesia dalam mencari data pekerja anak sektor informal yang dianggap sulit untuk didapatkan :

- a. Inspeksi sekolah yang dilakukan oleh inspektur sekolah, guru, dan kelompok orang tua murid (apabila anak terkendala tidak sekolah karena kerja);
- b. Pemantauan tempat kerja oleh pengawas ketenagakerjaan atau tim pemantauan independen yang dibayar untuk melakukan pemantauan;
- c. Pemantauan masyarakat oleh pemerintah daerah, organisasi masyarakat, kelompok aksi sosial daerah tersebut dan komite kewaspadaan masyarakat seperti Ormas, LSM, Dll.
- d. Skema audit sosial (pemantuan yang bersifat sukarela terhadap fenomena pekerja anak)

Diharapkan upaya penanganan pekerja anak dapat terus dilakukan dan berjalan dengan baik, tentunya tidak terlepas dari peran lembaga pendidikan, ketenagakerjaan dan

perlindungan anak disemua tingkat pemerintahan. Di tingkat nasional dapat bekerjasama dengan kementerian yang relevan, di tingkat masyarakat/kota madya/kabupaten dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah, serta bekerjasama melalui aliansi dengan pihak mitra yang berminat untuk melakukan upaya pemantauan pekerja anak. CLM dikaitkan dengan sistem pengawasan ketenagakerjaan karena inspektorat ketenagakerjaan biasanya merupakan institusi utama yang diberi atau mempunyai mandat untuk menangani masalah pekerja anak seperti Disnakertrans Prov Jatim.

2. Kendala Yang Dihadapi Disnakertrans Prov. Jawa Timur Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Kecamatan Klojen Kota Malang

Pelaksanaan pemenuhan hak-hak pekerja anak yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi tentu memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor kendala yang mempengaruhi berasal dari faktor internal dan eksternal, seperti berikut:

a. Faktor internal

Dalam pelaksanaannya tentu ada faktor internal yang mempengaruhi tidak berjalannya pemenuhan hak-hak pekerja anak, seperti implementasi dari peraturan perundang-undangan oleh pihak yang berwajib terkait dengan perlindungan hukum terhadap pekerja anak sektor informal. Kendala pertama karena belum meratanya implementasi dari peraturan tersebut serta kurangnya kesadaran hukum dari instansi atau lembaga yang diwajibkan untuk melaksanakan pemenuhan hak-hak pekerja anak.

Kendala kedua ialah susahnya pekerja anak sektor informal untuk dikumpulkan. Ibu Ida Sri Wahyuni juga menambahkan bahwa faktor internal lainnya yang menyebabkan kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak pekerja anak adalah susah untuk dikumpulkan, karena mereka masih suka kabur ketika ada pihak Disnaker Sub Pengawasan datang, hal tersebut berpotensi membuat kebiasaan pekerja anak tidak taat dengan aturan yang ada.

Selain itu, data pekerja anak sektor informal yang tidak tercatat sehingga dalam menerapkan upaya perlindungan terhadap pekerja anak tidak dapat berjalan sama sekali. Seperti yang Ibu Ida Sri Wahyuni juga mengungkapkan bahwa alasan Disnakertrans Prov. Jatim kurang memperhatikan pekerja anak sektor informal karena susah menjangkau pekerja anak karena ketidakjelasan keberadaan mereka yang selalu berubah-ubah sehingga untuk data sangat sulit didapatkan. Pada akhirnya dalam melakukan pemantauan susah dilakukan terhadap pekerja anak karena ketiadaan data yang kurang akurat. Artinya harus diupayakan untuk pendataan pekerja anak, karena sektor informal perlu serius dilihat datanya.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal yang menimbulkan kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak pekerja anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ialah faktor perilaku masyarakat sekitar atas kurangnya kesadaran hukum, baik dari pemberi kerja atau pelaku usaha dan orang tua anak-anak. Pasalnya menurut Ibu Ida Sri Wahyuni mengungkapkan bahwa kurangnya pemahaman orang tua dan pemberi kerja atau pelaku usaha terhadap pentingnya menjaga anak-anak untuk tidak memperkerjakan terlalu lama lebih dari 3 jam dan dari orang tua yang selalu menganggap lebih penting mencari uang karena untuk biaya hidup pun tidak akan ada yang menanggung selain mereka sendiri. Sementara itu, banyak anak-anak yang tidak mau diajak dalam melaksanakan pembinaan berbentuk pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah. Serta dari pihak pemberi kerja juga kurang terurus mengenai pekerja anak kepada pihak Disnakertrans Prov. Jatim. Selain itu menurut hasil wawancara peneliti dengan pelaku usaha tahu bakso mengungkapkan bahwa ada salah satu pekerja anak yang dikenal bernama memet selaku informan 2 yang adalah tetangga sendiri, karena kegiatannya bekerja atau berjualan membuat beberapa teman memet yang

akhirnya ikut-ikutan untuk bekerja sama seperti halnya pekerja anak bernama memet.

Hal ini disebabkan faktor lingkungan juga memiliki pengaruh besar. Anak-anak yang hidup di lingkungan teman-temannya yang cenderung menyukai bekerja daripada bersekolah, ini akan menanamkan nilai-nilai tertentu yang mereka anggap sesuai dengan dunianya. Hal tersebut yang pada akhirnya membuat kesulitan instansi atau lembaga pemerintah untuk melakukan implementasi terhadap perlindungan hukum pekerja anak baik di sektor informal maupun formal.

Hambatan lainnya juga dilihat dari sisi aparatur pemerintahan dalam mengidentifikasi apakah seseorang itu termasuk dalam kelompok pekerja dewasa atau anak-anak, sebab tidak jarang pemberi kerja dengan memanfaatkan kelemahan sistem administrasi kependudukan melakukan pemalsuan usia pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).

PENUTUP

Simpulan

Pekerja anak pada dasarnya dilarang untuk bekerja, namun dalam kondisi tertentu yang mereka alami anak diizinkan untuk bekerja. Pada kenyataannya hal tersebut tidak bisa terealisasi dengan baik, pasalnya banyak dari anak-anak yang masih dalam himpitan ekonomi rendah yang dialami oleh keluarganya, sehingga mereka harus ikut andil dalam kegiatan mencari nafkah demi kebutuhan sehari-harinya yang sangat kurang. Lebih ironisnya lagi bagi anak-anak yang telah putus sekolah karena ketidakmampuan orang tua mereka dalam menanggung biaya pendidikan khususnya anak-anak dalam ekonomi rendah. Anak-anak yang memutuskan untuk tidak bersekolah sudah banyak terjadi di negara ini, khususnya pada Kota Malang.

Dikeluarkannya Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu upaya negara dalam memberikan perlindungan bagi setiap orang yang terikat dalam perjanjian kerja, tidak hanya orang dewasa saja yang dilindungi oleh peraturan tersebut, namun didalamnya memuat juga syarat-syarat memperkerjakan anak meskipun pada dasarnya anak dilarang untuk bekerja, namun hal tersebut masih dapat ditolerir apabila pengusaha atau pemberi kerja memenuhi syarat-syarat

memperkerjakan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dalam hal ini Disnakertrans Prov. Jatim memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap para pekerja dewasa maupun pekerja anak, khususnya pada pekerja anak di Kota Malang, namun implementasi atau pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Alun-Alun Merdeka Klojen Kota Malang yang seharusnya selaras dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 69 belum semuanya terealisasi dengan baik pada pekerja anak sektor informal. Terhadap pekerja anak sektor informal, Disnakertrans Prov. Jatim lebih mengarah pada bantuan-bantuan sarana prasarana, pembinaan dan pelatihan lebih ditekankan pada pekerja anak di sektor formal dengan mengadakan sosialisasi terkait dengan pembatasan kerja jika anak memang ingin bekerja.

Saran

a. Bagi Pemerintah

Pemerintah melalui lembaga-lembaga terkait seperti Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, perlu lebih intensif dalam mendorong program-program yang secara khusus ditujukan untuk pekerja anak, terutama di sektor informal.

Tujuannya adalah agar orang tua dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya menjaga kesejahteraan mental dan pertumbuhan anak-anak, serta menyadari bahwa seharusnya anak-anak tidak diperkenankan untuk bekerja.

b. Bagi Pemberi Kerja

Pemberi Kerja seharusnya memiliki kesadaran akan syarat-syarat memperkerjakan anak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pentingnya memperhatikan syarat-syarat memperkerjakan anak agar anak dapat terus mendapatkan hak mereka selama bekerja, mengingat mereka juga manusia yang memiliki hak sama dengan orang dewasa. Khususnya Pemberi Kerja harus memperhatikan waktu dan jam kerja anak 3 jam lamanya.

c. Bagi Orang tua

Orang tua sebagai orang terdekat dalam kehidupannya, tentu peran orang tua sangat penting untuk pertumbuhan mereka. Mengingat orang tua adalah keluarga, yang dimana keluarga sebagai penanggung jawab pertama dan utama masa depan anak-anak, pekerja anak pada pekerjaan sektro informal harus tetap dibawah kendali orang tuanya dan tanggung jawab orang tua. Oleh karena itu, Pemahan orang tua terkait

dengan memperkerjakan anaknya sangat diperlukan dan penting guna untuk menjaga tumbuh kembang anak sehingga, peran orang tua sangat berpengaruh penting dalam memberikan penanganan dan pengawasan terhadap anak-anak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- (IPEC), I. P. (1997). *Child Labour Monitoring (CLM)*. Diambil kembali dari International Labour Organization: <https://www.ilo.org/ipecc/Action/Childlabourmonitoring/lang--en/index.htm>
- Afiyani, L., & Faridah, S. (2019). Isu Pekerja Anak Dan Hubungan dengan Hak Asasi Manusia . *Lex Scientia Law Review* , 173.
- Ariyanti, I. (2016). Studi Kasus Pekerja Anak di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang Child Labour In District Sematang Borang Palembang (Case Study). *Jurnal Ilmiah STIE MDP*, 82.
- Association, B. G. (2004, Agustus). *BGMEA*. Diambil kembali dari Child Labour Monitoring (CLM): <https://www.ilo.org/ipecc/Action/Childlabourmonitoring/lang--en/index.htm>
- Basu, K. (1999). Child Labor : Cause, Consequence, and Cure, with Remarks on International Labor Standars. *Journal Of Economic Literature*, 1083-1119.
- Bismar Siregar, M. W. (1986). *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Yayasan LBH Indonesia - C.V. Rajawali.
- Cahyono, B. T. (1983). *Pengembang Kesempatan Kerja . Fakultas Ekonomi UGM .*
- Endrawati, N. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal (Studi Kasus Di Kota Kediri). *Jurnal Dinamika Hukum*, 2.
- Rahma, S. (2021, Juni Rabu). *Dua Tahun, 128 Pelajar di Kota Malang Putus Sekolah*. Diambil kembali dari Jawa Pos RADAR MALANG: <https://radarmalang.jawapos.com/pendidikan/811076416/dua-tahun-128-pelajar-di-kota-malang-putus-sekolah>
- Statistik, B. P. (2014). *Survei Sektor Informal Tahun 2014*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.